

ANALISIS DINAMIKA PEMIKIRAN AMIEN RAIS TENTANG KONSEPSI ISLAM DAN POLITIK**M. Prakoso Aji**

UPN Veteran Jakarta

Email: prakosoaji@upnvj.ac.id

Abstrak

Dinamika pemikiran Amien Rais mengenai hubungan antara konsepsi Islam dan Politik menggambarkan pandangannya mengenai relevansi antara pendekatan agama dengan bentuk negara. Amien Rais seringkali disandingkan sebagai tokoh neo modernisme Islam dalam perpolitikan nasional. Pemikiran Amien Rais mengawali terjadinya reformasi di Indonesia dengan bergantinya pemerintahan Presiden Soeharto yang sudah berkuasa puluhan tahun. Pemikiran Amien Rais mengedepankan ajaran tauhid dalam fungsi pemimpin dan negara. Berdirinya PAN merupakan buah karya politiknya. Dalam perkembangannya pemikiran Amien Rais mengalami berbagai dinamika. Memudarnya pengaruh Amien Rais di PAN kemudian menghadirkan Partai Ummat. Peralihan ini juga semakin menggambarkan perubahan sosok Amien Rais sebagai tokoh neomodernisme menjadi pandangan yang sangat agamis dalam berpolitik. Untuk itu penelitian ini akan menggambarkan dinamikan perubahan pemikiran Amien Rais terkait konsepsi Islam dalam Politik. Penulis memilih menggunakan metode kualitatif dengan penggunaan studi literatur yang diutamakan untuk menganalisis pemikiran Amien Rais. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pergeseran pemikiran politik Islam Amien Rais yang dijabarkan dengan berdirinya Partai Ummat sebagai kendaraan politik barunya.

Kata Kunci : Pemikiran Politik Islam, Negara, Partai Politik, Neomodernisme

Abstract

The dynamics of Amien Rais's thoughts on the relationship between the Islamic concept and politics depict his views on the relevance of the religious approach to the form of the state. Amien Rais is often regarded as a figure of Islamic neo-modernism in national politics. His thoughts marked the beginning of the reform era in Indonesia, coinciding with the change in the government from President Soeharto, who had been in power for decades. Amien Rais's thinking emphasizes the doctrine of tawhid in the functions of leaders and the state. The establishment of the National Mandate Party (PAN) is a result of his political endeavors. Throughout its development, Amien Rais's thinking has undergone various dynamics. The diminishing influence of Amien Rais in PAN led to the emergence of the Ummat Party. This transition further illustrates the transformation of Amien Rais's image from a figure of neo-modernism to one with a highly religious perspective in politics. Therefore, this research aims to illustrate the dynamics of the changes in Amien Rais's thoughts regarding the conception of Islam in politics. The author chose to use a qualitative method, primarily relying on literature studies to analyze

How to cite:	M. Prakoso Aji (2023), Analisis Dinamika Pemikiran Amien Rais Tentang Konsepsi Islam dan Politik, (5) 10, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2839
E-ISSN:	2684-883X
Published by:	Ridwan Institute

Amien Rais's thoughts. The research results indicate a shift in Amien Rais's political Islamic thinking, exemplified by the establishment of the Ummat Party as his new political vehicle.

Keywords: Islamic Political Thought, State, Political Parties, Neomodernism

PENDAHULUAN

Pandangan Amien Rais dalam kancah perpolitikan nasional menarik untuk dicermati lebih dalam. Hal ini berkaitan dengan sejarah panjang Amien Rais dalam perkembangan demokrasi yang hadir, khususnya di era reformasi. Hal ini menjadi bagian dari perkembangan sejarah panjang bangsa yang di era Orde Baru mendapat begitu banyak tantangan. Amien Rais, dipandang sebagai salah satu pemimpin reformasi, memulai perdebatan penting tentang suksesi presiden pada sidang Tanwir Muhammadiyah ke-73 tahun 1993 di Surabaya (Hasnu & Syam, 2021; SETIAWAN, 2018). Pada pandangannya, tahun 1998 menjadi waktu yang krusial bagi kepemimpinan nasional untuk mengalami pergantian. Perannya menjadi sangat penting dalam jatuhnya rezim Orde Baru (Barton et al., 2021). Amien Rais pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan memprakarsai terbentuknya "poros tengah". Dalam perjalanan politiknya, Amien Rais menyatukan gagasan tentang moral dan etika dalam praktek politiknya. Karena pendekatan ini, dia dianggap sebagai salah satu dari sedikit tokoh pemikiran politik Islam yang berhasil mendirikan dan mengembangkan partai politik hingga saat ini.

Dalam perkembangannya kemudian pemikiran politik Amien Rais mengalami dinamika dalam tataran implementasi tauhid dengan pemikiran politiknya. Pada pemilu 2019, pemikiran politik Amien Rais mulai terlihat dekat dengan kelompok fundamentalisme Islam (Aji, 2020). Hal ini nampak berbeda dengan pemikiran Amien Rais ketika awal reformasi. Pemikiran neo modernisme Amien Rais yang dikedepankannya nampaknya bergeser dengan lebih mengedepankan nilai-nilai Ke-Islaman dalam pemikiran politiknya. Pemikiran Amien Rais dengan membentuk Partai Amanat Nasional (PAN) di awal reformasi sebagai partai nasionalis, kemudian justru berubah dengan keluarnya Amien Rais, dan kemudian terbentuklah partai baru, yaitu Partai Ummat yang sangat kental bernafaskan partai agamis. Amien Rais berpandangan bahwa PAN saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan konsepsi perjuangannya. Amien Rais juga semakin merefleksikan perjuangannya untuk membela kepentingan umat muslim di Indonesia. Dinamika pemikiran Amien Rais menarik untuk dikaji dan dicermati secara mendalam. Beberapa pakar seringkali melekatkan Amien Rais sebagai tokoh Islam kontemporer, namun dalam perkembangannya terdapat dinamika yang penulis cermati dari pemikiran Amien Rais dalam kaitannya antara politik dengan agama. Hal inilah yang menjadi tujuan dari penulis untuk melihat dinamika pemikiran Amien Rais. Dalam konstelasi politik nasional sosok Amien Rais masih memiliki peran dan pengaruh yang cukup besar (AKBAR, 2022). Pemikiran Amien Rais memiliki pengaruh yang sangat besar dalam suksesi kepemimpinan di era reformasi. Pemikiran-pemikiran neo modernisme Islam Amien Rais pada perkembangannya mengalami pergeseran ke arah yang lebih fundamental agamis dalam pemikiran politiknya.

Tulisan ini merujuk pada tiga poin utama dalam kerangka berpikirnya. Pertama, terfokus pada pemikiran politik yang mengeksplorasi hubungan antara nilai-nilai keislaman dengan konsep bentuk negara. Kedua, menelaah pemikiran politik dari perspektif karakteristik kepemimpinan dalam Neo-Modernisme Islam, termasuk

bagaimana suksesi kepemimpinan diatur. Ketiga, menyoroti konteks partai politik dari sudut pandang Neo-Modernisme Islam. Ketiga poin tersebut direduksi ke dalam berbagai aspek yang terkait, seperti penafsiran terhadap demokrasi dan penerapan hubungan antara negara dan masyarakat, kualifikasi kepemimpinan yang sejalan dengan ajaran tauhid keislaman, serta penerapan etika dan moral keislaman dalam ideologi dan arah partai politik sebagai *platform* perjuangan. Fazlur Rahman dalam Widayani (2020) mencetuskan gagasan tentang neo-modernisme sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi dalam mengakomodasi kebutuhan Islam di era modern .

Pandangan Neo-Modernisme dalam politik Islam adalah bagian dari pandangan politik yang berakar pada pandangan keislaman yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman (Abror, 2016). Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam perspektif Neo-Modernisme Islam ini adalah Amien Rais. Amien Rais memperkenalkan prinsip-prinsip ajaran Islam ke dalam sistem politik nasional, yang terkait erat dengan cara Islam memandang hubungan antara agama dengan negara, pandangan tentang kepemimpinan, dan sifat dari para pemimpin yang menegakkan prinsip-prinsip moral dan etika seperti "amar ma'ruf nahi munkar". Dia juga menghubungkan nilai-nilai keislaman dengan arah perkembangan ideologi partai politik di Indonesia. Dalam pemikiran politiknya, Amien Rais sangat menekankan pada prinsip tauhid, etika, dan moral yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam pandangannya, meskipun demokrasi juga dapat mengajarkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman, namun tidak semua bentuk demokrasi ala Barat harus diadopsi seluruhnya (Gunawan, 2019).

Dalam perkembangannya terjadi perubahan pemikiran Amien Rais. Pandangan Amien Rais semakin melekatkannya dengan kelompok fundamentalisme Islam. Keluarnya Amien Rais dari PAN yang didirikannya di awal reformasi menjadi puncak eskalasi pemikiran Amien Rais yang selanjutnya justru mendirikan partai baru, yaitu Partai Ummat yang merepresentasikan identitasnya sebagai partai agamis. Hal ini berbeda dengan gagasan Amien Rais dalam pemikirannya di awal reformasi ketika mendirikan PAN sebagai bentuk pemahaman nilai-nilai modern yang digabungkan dengan konsepsi tauhid dalam bingkai nasionalis. Oleh karena itu terkait dinamika pemikiran politik yang digambarkan Amien Rais, penulis ingin mengkaji apakah pemikiran politik Amien Rais di awal reformasi dalam melihat konsepsi Islam dan kepemimpinan dalam negara sesuai dengan konsepsi neo modernisme Islam? kemudian dalam perkembangannya mengapa terjadi dinamika pemikiran Amien Rais? Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut untuk menggambarkan pemikiran Amien Rais mengenai konsepsi Islam dan politik yang mewarnai proses reformasi kekuasaan di Indonesia dalam beberapa puluh tahun terakhir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analitis deskriptif. Penulis menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis adanya dinamika dalam pemikiran Amien Rais tentang konsepsi Islam dalam Politik. Perubahan ini menggambarkan suatu proses transformasi pemikiran Amien Rais dan buah karya politiknya dengan adanya PAN hingga Partai Ummat. Penulis menggunakan studi literatur untuk memperkaya data dan menguraikannya dalam suatu bentuk analisis yang komprehensif. Tambahan data pendukung penulis dapatkan dari berbagai sumber sekunder seperti website, dan literatur pendukung lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Neo Modernisme Dalam Pemikiran Politik Amien Rais: Konsepsi Islam Dalam Negara

Pemikiran Amien Rais pada awal masa reformasi terkait erat dengan konsepsi Islam serta pandangan mengenai kepemimpinan dalam negara. Amien Rais menerima nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan modernitas, namun menyelaraskannya dengan konsep tauhid dalam Islam, sehingga pemikirannya tergolong dalam aliran Neo-Modernisme Islam. Amien Rais mengklasifikasikan "*low politics*" terkait adanya politisasi dakwah untuk kepentingan politik praktis guna memenangkan partai politik. Selain itu, penggunaan jamaah pengajian dalam majelis taklim untuk mendapatkan dukungan politik, suara, dan basis konstituen. Amien Rais menilai hal semacam itu sebagai "low politics" yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid. Bagi Amien Rais, politik yang tinggi atau "high politics" sebenarnya didasarkan pada tiga prinsip penting: kejujuran, tanggung jawab, dan kesetaraan. Ketiganya saling terkait dan menjamin terwujudnya jenis politik yang sesuai karena bersumber dari ajaran Al-Quran. Bagi Amien Rais, pentingnya pintu ijtihad yang terbuka adalah krusial. Baginya, ini merupakan kunci bagi umat Islam untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, karena memungkinkan adaptasi dan interpretasi yang relevan terhadap ajaran Islam dalam konteks yang berkembang (Abror, 2016).

Menurut pemikiran Amien Rais, sebenarnya umat Islam diharapkan untuk menempati posisi kepemimpinan, sehingga usaha untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman dapat dilakukan dengan lebih mudah (AKBAR, 2022). Namun, dalam realitasnya, orang zalim dan sistem yang zalim kadang bisa menduduki posisi kekuasaan, dan Amien Rais melihat hal ini sebagai kesalahan dari orang-orang yang beriman sendiri. Meskipun dalam tingkat global dan nasional umat Islam belum mampu memimpin dalam upaya menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman, Amien Rais tetap meyakini bahwa tugas ini harus dilakukan. Hal ini adalah inti dari konsep "amar maruf nahi munkar" dalam Islam, di mana upaya untuk mendorong kebaikan dan menolak keburukan tetap menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan, meskipun dalam kondisi di mana kekuasaan belum sepenuhnya berada di tangan umat Islam (Nashir, 2017).

Dalam pandangan Amien Rais yang diungkapkan dalam tulisan Nashir (2017), terdapat beberapa alasan yang menjelaskan mengapa dia tidak membangun partai politik berdasarkan asas agama. Pertama, dari segi teologi, Amien Rais tidak melihat adanya ajaran atau contoh dari Nabi yang mewajibkan menggunakan Islam sebagai dasar dalam membangun negara. Bahkan dalam pembentukan negara Madinah, Nabi mengajak kelompok Nasrani dan Yahudi. Kedua, dari segi rasional, Amien Rais merujuk pada sejarah politik di Indonesia yang menunjukkan bahwa partai-partai Islam belum pernah memperoleh mayoritas suara dalam pemilihan umum. Meskipun pada masa kejayaan Masyumi ketika umat Islam bersatu di bawahnya, mereka tetap tidak memperoleh mayoritas suara. Ketiga, terdapat kekhawatiran dari sebagian kelompok minoritas terhadap pendirian partai berbasis agama. Dengan adanya partai yang inklusif lintas agama dan lintas etnik, kelompok minoritas merasa lebih terlindungi. Amien Rais melihat hal ini sebagai bagian dari tugas keagamaan seorang Muslim. Amien Rais juga menyoroti realitas sosial di Indonesia, di mana pembentukan partai tunggal berbasis Islam masih sulit dilakukan karena umat Islam di Indonesia memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi secara sosiologis dan politis. Meskipun demikian, Amien Rais percaya bahwa keanekaragaman ini dapat menjadi kekuatan jika diorganisasikan dan diarahkan menuju

tujuan perjuangan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan mencapai demokrasi yang menjamin adanya hak asasi manusia (Barton et al., 2021; Iqbal, 2015).

Amien Rais juga mendukung pandangan-pandangan demokrasi dalam urusan pemerintahan. Namun, ia tidak sepenuhnya menerima seluruh prinsip demokrasi ala Barat. Bagi Amien Rais, inti dari demokrasi memiliki banyak kesamaan dengan nilai-nilai kebajikan yang diajarkan dalam Islam (Rais, 2011). Walaupun demikian, perlu diakui bahwa masih banyak unsur non-demokratis yang terus tumbuh dalam politik nasional kita. Ada aspek-aspek tertentu yang sejatinya tidak sejalan dengan hakikat demokrasi. Sebagai contoh, lembaga-lembaga perwakilan seperti DPR dan MPR masih cenderung menjadi subordinasi oleh kekuatan eksekutif dalam praktiknya. Mekanisme *check and balances* tidak dapat berjalan dengan lancar, menyebabkan pemerintah tidak dapat menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya secara tepat. Penting untuk diingat bahwa mekanisme *check and balances* ini tidak perlu dianggap sejalan dengan semangat liberalisme karena pada dasarnya merupakan ciri utama dari demokrasi universal (Riddell, 2002). Diperlukan *political will* yang kuat dari pihak pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial. Setiap pemerintahan dalam sistem demokrasi harus menyadari perannya sebagai pelayan rakyat, dan harus mematuhi prinsip bahwa rakyatlah yang mengontrol pemimpin.

Terkait dengan perspektif neo-modernisme dalam Islam di Indonesia, Muhammadiyah dianggap sebagai salah satu organisasi yang dapat mencerminkan pemikiran Amien Rais. Amien Rais melihat Muhammadiyah sebagai suatu *state of mind*, yakni suatu cara berpikir yang islami yang dapat menghasilkan perilaku yang harmonis, seimbang, bijak, dan progresif, dengan dampak positif bagi masyarakat. Bagi Amien Rais, Muhammadiyah adalah gerakan dinamis dan kreatif yang mencintai amal shalih dan selalu responsif terhadap perubahan (Nashir, 2017). Menurut Amien Rais, kepemimpinan ideal adalah yang mencerminkan sifat-sifat Siddik (jujur), Amanah (amanah dan dapat dipercaya), Tabligh (komunikatif dan menyampaikan informasi dengan baik), dan Fathanah (cerdas dan penuh ide kreatif). Baginya, model kepemimpinan yang sempurna hanya dapat ditemukan dalam diri Nabi Muhammad SAW (SETIAWAN, 2018).

Pemikiran Amien Rais Tentang Kepemimpinan Dan Suksesi Nasional

Dalam menelisik lebih dalam mengenai pemikiran politik Amien Rais yang berakar pada nilai-nilai ke-Islaman, perlu juga untuk mengkaji pandangannya terhadap karakteristik kepemimpinan yang sejalan dengan ajaran tauhid. Amien Rais yakin bahwa kepemimpinan yang mengikuti prinsip tauhid dapat memberikan manfaat yang besar bagi umat. Inilah yang menjadi fokus perjuangan Amien Rais dalam karir politiknya. Sebagai tokoh reformis yang berperan signifikan dalam menggulingkan rezim Orde Baru dan berhasil membawa Indonesia melalui proses suksesi kepemimpinan pasca-era Soeharto, Amien Rais memiliki pandangan yang matang terkait dengan pola kepemimpinan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, terutama di masa era reformasi pada saat itu (Barton et al., 2021).

Pandangan Amien Rais tentang kepemimpinan nasional membahas kriteria pemimpin bangsa dan mekanisme suksesi itu sendiri. Menurutnya, persoalan-persoalan besar bangsa Indonesia memerlukan seorang pemimpin yang memenuhi beberapa kriteria. Secara pokok, enam hal menjadi fokus kriteria pemimpin nasional menurut pandangan Amien Rais. Pertama, calon pemimpin bangsa harus setia terhadap Pancasila dan UUD 1945, serta memiliki pengalaman kepemimpinan yang sudah teruji. Kedua,

integritas pemimpin menjadi aspek penting, dengan menolak korupsi dan menjauhi skandal-skandal moral sehingga dapat menjadi teladan. Ketiga, seorang pemimpin harus menunjukkan sikap adil, memiliki komitmen terhadap kepentingan rakyat, dan mengedepankan kepentingan bangsa di atas segala hal. Keempat, pemimpin harus dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Kelima, pandangan ke depan yang sesuai dengan era globalisasi juga menjadi kriteria penting. Keenam, seorang pemimpin seharusnya memiliki kemampuan di dunia internasional, karena kerja sama dengan bangsa-bangsa lain dianggap sebagai kebutuhan yang tak terhindarkan bagi Indonesia yang tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri (AKBAR, 2022).

Dalam analisis kepemimpinan politik, Amien Rais menyatakan bahwa visi dan misi kepemimpinan dapat digolongkan ke dalam empat tipe kepemimpinan. Keempat tipe ini memberikan pemahaman mengenai kepemimpinan yang mungkin dibutuhkan, terutama dalam konteks permasalahan bangsa kita saat ini. Mereka juga dapat menjadi kerangka pembicaraan tentang visi dan misi kepemimpinan Indonesia menuju abad 21. Keempat citra kepemimpinan ini adalah: mujahid atau *crusader*, *salesperson* atau penjual, agen, dan pemadam kebakaran atau *fire fighter*. Seorang pemimpin tipe mujahid adalah pemimpin yang mengajak masyarakat untuk mentransformasikan sistem politik. Ciri khas seorang pemimpin mujahid melibatkan semangat kepemimpinan yang kuat (Naufal, 2017)

Pemimpin yang memiliki citra "penjual" atau *salesperson* mempunyai kemampuan persuasif yang dapat digunakan untuk meyakinkan masyarakat agar menerima suatu rencana atau ide, serta bersedia untuk mengimplementasikannya. Kualitas kepemimpinan ini menekankan interaksi antara pemimpin dan rakyat, keahlian dalam membuat kebijakan, dan kemampuan "menjual" atau mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Pemimpin dengan citra "agen" bertindak sebagai wakil dari masyarakat. Sementara pemimpin dengan citra "pemadam kebakaran" cenderung bereaksi terhadap masalah yang muncul, menyesuaikan tindakannya sesuai dengan tuntutan situasi. Meskipun demikian, tipe ini juga memiliki sisi positif, yaitu kemampuan merespon persoalan yang timbul dari konteks, tempat, dan waktu. Dari keempat tipe kepemimpinan tersebut, Amien Rais menganggap bahwa tipe kepemimpinan "mujahid" sangat diperlukan dalam konteks agenda bangsa Indonesia. Tipe ini lebih condong ke arah upaya transformatif dibandingkan dengan tipe kepemimpinan lainnya. Amien Rais juga menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan masyarakat sebagai permasalahan khusus dan fundamental dalam kepemimpinan. Menurutnya, relevansi pemimpin dan kepemimpinan sangat tergantung pada kondisi masyarakat. Amien Rais mencatat bahwa ada masyarakat yang mendukung pemimpin dalam melakukan perubahan, tetapi juga ada yang menghambat kreativitas pemimpin atau tidak mendukung langkah-langkah perubahan yang diambil. Jika kita menginginkan kepemimpinan tipe "agen," masyarakat harus memiliki aspirasi dan tuntutan untuk perubahan, serta mendukung implementasi langkah-langkah transformatif yang diambil oleh pemimpin (Al Farizi, 2016).

Menurut pandangan Amien Rais, masalah komunikasi antara pemimpin dan rakyat memegang peranan krusial. Hubungan yang renggang dapat menjadi hambatan bagi seorang pemimpin dalam menjalankan perannya, dan ketidakkomunikatifan dapat membatasi fleksibilitas pemimpin dalam memilih langkah kebijakan. Oleh karena itu, melihat dari perspektif kepemimpinan *salesperson*, kualitas komunikasi dan interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin menjadi perhatian utama. Amien Rais menekankan bahwa hanya pemimpin yang responsif dan tanggap terhadap lingkungannya yang dapat

memanfaatkan situasi untuk melakukan perubahan strategi dan reorientasi demi kemaslahatan bersama. Gaya kepemimpinan tipe "pemadam kebakaran" mengindikasikan bahwa kondisi-kondisi tertentu dapat memudahkan pemimpin untuk memberikan respons dan mengadakan perubahan. Dari keempat citra kepemimpinan tersebut, Amien Rais melihat bahwa masing-masing tipe kepemimpinan tidak selalu terpisah satu sama lain. Mereka dapat digabungkan dan dikombinasikan. Meskipun demikian, Amien Rais secara khusus menekankan pentingnya tipe pemimpin mujahid, yang menurutnya paling tepat untuk mengatasi permasalahan bangsa ini (Al Farizi, 2016).

Dalam konteks pemikiran Amien Rais mengenai suksesi nasional, peranannya terutama terlihat dalam mensukseskan pergantian kepemimpinan pada era turunnya Presiden Soeharto. Amien Rais menekankan beberapa poin penting terkait dengan suksesi kepemimpinan (Gerald, 2019): Pertama, Amien Rais menyatakan bahwa pemimpin nasional yang telah berkuasa dalam waktu yang sangat lama perlu diganti. Pandangan ini mencerminkan keyakinannya akan perlunya penyegaran dalam kepemimpinan untuk menghindari stagnasi. Kedua, Amien Rais mengingatkan bahwa jika seorang pemimpin menjabat terlalu lama, hal itu dapat menimbulkan kultus individu. Dalam konteks ini, ia merujuk pada potensi Soeharto menjadi sosok yang dikultuskan seperti Soekarno jika terus berkuasa dalam jangka waktu yang panjang. Ketiga, Amien Rais memandang bahwa pergantian pemimpin adalah suatu hal yang lumrah dalam sistem demokrasi. Ini mencerminkan pandangannya terhadap pentingnya prinsip demokratis dalam proses politik. Keempat, Amien Rais menyoroti kemungkinan berkurangnya kemampuan visi dan misi seorang pemimpin yang telah lama berkuasa. Ia melihat perlunya adanya pemimpin yang selalu segar dalam berpikir dan bertindak. Kelima, Amien Rais menekankan bahwa pemimpin yang terlalu lama berkuasa berpotensi menyamakan dirinya dengan negara, menunjukkan keprihatinannya terhadap terjadinya konsolidasi kekuasaan yang berlebihan. Dengan pandangan ini, Amien Rais memberikan argumen untuk mendukung suksesi kepemimpinan yang teratur dan demokratis sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan dan menghindari potensi risiko yang mungkin timbul akibat kepemimpinan yang berlangsung terlalu lama (Iqbal, 2015).

Pandangan Amien Rais mengenai kelelahan kepemimpinan nasional pada tahun 1998 diyakini mencapai titik kritis pada masa tersebut. Baginya, jika pergantian kepemimpinan tidak dilakukan pada waktu tersebut, masalah-masalah yang ada akan semakin memburuk dan berpotensi menjadi sangat berbahaya bagi masa depan bangsa Indonesia. Meskipun pada awalnya suaranya tidak begitu diperhatikan, terutama karena pada masa itu kekuasaan Presiden Soeharto masih sangat kuat, Amien Rais terus bersikeras menyoroti perlunya pergantian kepemimpinan. Dia semakin vokal dalam mengancam praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terkait dengan pemerintahan Soeharto selama tiga dekade. Lima tahun setelah Sidang Istimewa MPR pada Maret 1998 yang memilih Soeharto kembali sebagai presiden untuk ketujuh kalinya, pandangan dan upaya yang diadvokasi oleh Amien Rais mulai mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pernyataan ini mencerminkan bahwa pandangan Amien Rais tentang perlunya pergantian kepemimpinan dan penolakan terhadap praktik-praktik yang merugikan mulai mendapatkan perhatian dan dukungan dari masyarakat serta pihak-pihak terkait di Indonesia (Anwar, 2023).

Jatuhnya Orde Baru membuka jalan bagi para reformis seperti Amien Rais untuk memulai babak baru dalam tatanan demokrasi di Indonesia. Tokoh-tokoh reformis Islam sepakat bahwa suksesi kepemimpinan harus dilakukan segera. Momentum ini kemudian membawa K.H. Abdurahman Wahid, seorang tokoh Islam dari Nahdlatul Ulama, untuk

menduduki posisi sebagai kepala negara di republik ini. Dalam konteks ini, Abdillah dalam Riddle (2002) menjelaskan bahwa Amien Rais, sebagai seorang reformis modernis, memiliki pandangan yang dapat diterima oleh berbagai kalangan, termasuk kaum revivalis. Amien Rais menjabat sebagai Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelumnya, ia juga memimpin organisasi modernis Muhammadiyah. Meskipun tidak terlibat langsung dalam proses politik, pandangan reformisme modernis yang dipegang oleh Amien Rais terdengar melalui Muhammadiyah. Namun, Amien Rais tidaklah satu-satunya yang mewakili suara reformisme modernis. Suara serupa juga terdengar melalui aliansi antar partai politik yang terbentuk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang dikenal dengan sebutan "Poros Tengah" (Riddell, 2002).

Pergeseran Pemikiran Amien Rais Dalam Konsepsi Islam dan Politik

Pergeseran pemikiran Amien Rais mengenai konsepsi Islam dan politik tercermin dalam praktik politiknya, terutama dalam pendirian Partai Amanat Nasional (PAN) dan pembentukan partai baru bernama Partai Ummat. Pada awal berdirinya PAN, partai ini membawa semangat reformasi dan perubahan. Meskipun di era awal reformasi, Amien Rais awalnya setuju untuk tidak membentuk partai politik berlandaskan ideologi agama, sulit untuk memisahkan PAN dari organisasi besar seperti Muhammadiyah. Pandangan Osman, seperti yang dijelaskan dalam Barton (2021), mencatat bahwa jatuhnya Soeharto memiliki dampak signifikan dalam perkembangan politik partai berideologi Islam di Indonesia. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi "primary group" dengan munculnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PAN (Barton et al., 2021).

Perlu digarisbawahi bahwa Muhammadiyah tidak meminta anggotanya untuk memilih partai politik tertentu, termasuk PAN, namun posisi Amien Rais sebagai pemimpin PAN menunjukkan bahwa keterlibatan organisasi tersebut tidak sepenuhnya netral secara politik. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa Muhammadiyah, sejak tahun 2005, telah menetapkan kebijakan yang melarang partai politik untuk menggunakan namanya. Kebijakan ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah untuk tetap netral secara politik (Gunawan, 2019). Dalam perkembangannya PAN mengalami perubahan pada pemilu 2019.

Perkembangan di internal Partai Amanat Nasional (PAN) pada pemilu 2019 mencerminkan dinamika politik dan perpecahan dalam dukungan terhadap calon presiden. Amien Rais, tokoh kunci di PAN, memilih untuk mendukung Prabowo Subianto dan tidak mendukung Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019. Konflik ini membawa dampak internal yang signifikan di dalam PAN. Pada saat itu, dilaporkan bahwa Amien Rais dan Zulkifli Hasan, ketua umum PAN, memiliki pandangan yang berbeda dan terjadi ketegangan di dalam partai. Rakernas (rapat kerja nasional) PAN pada tahun 2018 menjadi panggung di mana perbedaan pandangan ini semakin terbuka. Beberapa kader PAN mendukung Jokowi, sementara yang lain mendukung Prabowo. Konflik ini tidak hanya mempengaruhi internal PAN tetapi juga mencuat ke publik. Persoalan muncul ketika Zulkifli Hasan ingin menjabat kembali sebagai ketua umum PAN untuk periode kedua, yang tidak disetujui oleh Amien Rais. Setelah terpilih kembali, Zulkifli Hasan mengganti posisi Amien Rais sebagai Ketua Dewan Kehormatan dengan Soetrisno Bachir. Hanafi Rais, putra Amien Rais dan kader PAN yang berpengaruh, juga keluar dari partai ini, mengindikasikan semakin pudarnya pengaruh Amien Rais di PAN (Octaviani, 2017).

Penelitian penulis sebelumnya terkait dengan konstelasi politik pasca pandemi, dimana didalamnya juga mencermati peluang PAN bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang relevan menjadi bahan pendukung dalam tulisan ini. Berdasarkan penelitian sebelumnya, analisis penulis terkait pertemuan antara Ketua Umum PAN dengan Presiden Jokowi pada saat pandemi, memperlihatkan motivasi PAN untuk bergabung dengan pemerintah. Hal ini kemudian ditunjukkan dengan diangkatnya Zulkifli Hasan sebagai Menteri di dalam koalisi pemerintah (Aji, 2020). Hal ini semakin mendiskreditkan posisi Amien Rais dalam tubuh partai berlambang matahari ini. Kiprah politik Amien Rais dilanjutkannya dengan mendirikan Partai Ummat yang nampaknya menggeser haluan konsepsi neo modernisme Amien Rais menjadi lebih fundamentalisme dalam memaknai konsepsi Islam dalam hubungannya dengan negara, kepemimpinan, dan politik.

Dengan berakhirnya pengaruh Amien Rais di Partai Amanat Nasional (PAN), terjadi perpecahan internal yang mengakibatkan pendirian Partai Ummat sebagai kendaraan politik baru bagi Amien Rais. Perpecahan ini terjadi saat Amien Rais memberikan dukungan kepada Muldachri Harahap, pesaing Zulkifli Hasan, untuk terpilih sebagai Ketua Umum PAN. Perbedaan pandangan ini juga mencakup ketidaksetujuan Amien Rais terhadap rencana PAN untuk merapat ke koalisi pemerintah. Partai Ummat, yang didirikan oleh Amien Rais, mempresentasikan filosofi yang sangat agamis. Logo partai ini disebut sebagai "perisai tauhid," menekankan pada ajaran tauhid dalam konsep pemahaman Islam (Aji, 2020). Pendirian partai baru ini nampaknya mencerminkan perubahan politik dan ideologis Amien Rais, yang mungkin merasa bahwa visinya lebih sesuai dengan nilai-nilai Partai Ummat

Partai Ummat memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negeri "Baladun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur" dengan menegakkan nilai-nilai ilahiah, ukhuwah (persaudaraan umat), musawah (kesamaan), dan 'adaalah (keadilan) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Abror, 2016). Visi ini mencerminkan aspirasi partai dengan landasan nilai-nilai islami dan prinsip-prinsip keadilan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dilansir dari laman Gatra, Partai Ummat menunjukkan optimisme bahwa mereka dapat lolos untuk ikut serta dalam pemilihan umum tahun 2024. Dalam konteks ini, Islam dijadikan sebagai ideologi utama partai, yang berarti bahwa segala tindakan partai akan didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip syariah (Aji, 2020).

Sedangkan pandangan Wakil Ketua DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, menyoroti perbedaan ideologi antara PAN dan Partai Ummat. Menurutnya, PAN memiliki ideologi nasionalis-religius, sementara Partai Ummat sejak awal mengusung ideologi Islam. Perbedaan ideologi ini dianggap sebagai faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan di kalangan masyarakat. Viva Yoga menyatakan bahwa tidak banyak anggota PAN yang kemungkinan besar akan berpindah ke Partai Ummat, karena perbedaan ideologi yang signifikan antara kedua partai tersebut (SYARAT & KURNIAWAN, n.d.). Selain itu, pendapat pakar politik Adi Prayitno mengindikasikan bahwa Partai Ummat mungkin menghadapi kesulitan dalam meraih dukungan yang signifikan. Menurutnya, masyarakat Indonesia cenderung melihat Islam sebagai identitas daripada sebagai pilihan politik. Pandangan ini dapat mempersulit partai-partai yang menekankan ideologi keislamannya untuk mendapatkan dukungan massa yang besar. Selain itu, persaingan dengan partai-partai Islam lainnya, seperti PKS, PBB, dan PKB, yang telah memiliki basis massa yang lebih mapan, dapat menjadi tantangan tambahan bagi Partai Ummat (Iqbal, 2015). Setelah era reformasi dilaksanakan di Indonesia suara partai-partai Islam tidak pernah menjadi

pemenang dalam pemilu. Hal ini sekiranya menggambarkan bahwa partai nasionalis lebih diminati oleh sebagian besar kalangan masyarakat di Indonesia.

KESIMPULAN

Pandangan Amien Rais meyakini bahwa seorang pemimpin harus memiliki moralitas dan etika yang sesuai dengan ajaran tauhid. Meskipun ia menyetujui pandangan-pandangan demokrasi dalam kehidupan bernegara, Amien Rais tidak secara langsung menerima secara sepenuhnya konsep demokrasi ala barat. Baginya, substansi pokok demokrasi memiliki persamaan dengan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam Islam. Menurut pandangan Amien Rais, tipe kepemimpinan mujahid sangat diperlukan karena cenderung menuju usaha-usaha transformatif dibandingkan dengan tipe kepemimpinan lainnya. Namun, pada Pemilu 2019, terjadi perubahan pemikiran dan sikap Amien Rais, yang akhirnya membawanya keluar dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah ia dirikan sebagai wadah perjuangan. Ia kemudian mendirikan Partai Ummat, yang memiliki landasan ideologis yang berbeda dengan PAN. Partai Ummat lebih mengutamakan ideologi agamis, sementara PAN merupakan partai nasionalis. Meskipun pada awal reformasi, Amien Rais tidak setuju dengan ide mendirikan partai agamis, pada pemilu 2019 pandangan pemikirannya nampaknya mengalami perubahan. Konsepsi pemikiran neo modernisme Islam Amien Rais mengenai hubungan Islam dan negara, yang awalnya mengusung ideologi moderat, nampaknya kini mulai bergerak ke arah fundamentalisme. Pendirian Partai Ummat menjadi perwujudan ideologis Amien Rais dalam perannya di panggung politik nasional. Hal ini menarik untuk melihat posisinya dalam kancah perpolitikan nasional.

BIBLIOGRAFI

- Abror, R. H. (2016). Amien Rais: Filosofi Aksi dan Pemikiran Kritis Reformis Muslim Indonesia. *Yogyakarta: Semesta Ilmu*.
- Aji, M. P. (2020). Konstelasi Politik di Tengah Pandemi: Potensi Bertambahnya Dukungan Partai Politik Bagi Pemerintah. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(2), 179–194.
- AKBAR, F. (2022). Konsep Pemikiran Politik Ekonomi Islam (Studi Pemikiran Prof. Dr. M. Amien Rais, MA). *Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Al Farizi, M. (2016). Konfigurasi Pemikiran Relasi Islam dan Negara di Indonesia. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 10(2), 551–569.
- Anwar, M. K. (2023). Kajian Filosofis Konsep High Politics Amien Rais dan Korelasinya Dengan Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 70–92.
- Barton, G., Yilmaz, I., & Morieson, N. (2021). Authoritarianism, democracy, islamic movements and contestations of islamic religious ideas in Indonesia. *Religions*, 12(8), 641.
- Gerald, G. (2019). Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme

- di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 135–157.
- Gunawan, A. I. (2019). Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan M. Amien Rais tentang Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyah*, 4(01), 76–94.
- Hasnu, H., & Syam, F. (2021). Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme PDIP dan Islam Moderat PKB. *Syntax Idea*, 3(7), 1620–1634.
- Iqbal, M. (2015). *Pemikiran Politik Islam*. Kencana.
- Nashir, H. (2017). Kajian Pemikiran Politik Islam Kontemporer. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 1(1).
- Naufal, M. F. (2017). *Hubungan Agama dan Negara Dalam Pemikiran Politik Islam Di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Effendy)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Octaviani, V. (2017). *Konsepkhilāfah Perspektif Amien Rais Dan Jamaluddin Al-Afghani*. UIN Raden Intan Lampung.
- Rais, M. A. (2011). Saya seorang demokrat: percik-percik pikiran Amien Rais. *Suara Muhammadiyah*.
- Riddell, P. G. (2002). The diverse voices of political Islam in post-Suharto Indonesia. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 13(1), 65–84.
- Setiawan, H. (2018). *Pemikiran Politik M. Amien Rais Tentang Demokrasi Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah*. UIN Raden Intan Lampung.
- Syarat, Y. M. S. D., & Kurniawan, H. (n.d.). *Studi Pemikiran M. Amien Rais tentang Relasi Islam dan Negara*.
- Widayani, H. (2020). Neomodernisme Islam dalam Perspektif Fazlur Rahman. *El Afkar*, 9(1), 85–100.

Copyright Holder:

M. Prakoso Aji (2023)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

